

**ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Kasus pada BUMDes di Kec. Lambu Kabupaten Bima)**

Surya Arafah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
Suryaarafah18@gmail.com

Biana Adha Inapty

bianainapty@unram.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Bq. Rosyida Dwi Astuti

rosyidabaig@unram.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan hanya menguraikan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan saat dilapangan. Terdapat 14 BUMDes yang dianalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 13 BUMDes yang memiliki laporan keuangan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. BUMDes Usaha Baru, BUMDes Usaha Baru Rato, BUMDes Sama Kai, BUMDes Soro Mandiri dan BUMDes Harapan Bersama hanya membuat neraca saja. BUMDes Maja Labo Dahu dan BUMDes Lu'u Lambu hanya membuat laporan laba rugi saja. BUMDes Mantika Lanta hanya membuat laporan perubahan modal saja. BUMDes Damai hanya membuat laporan laba rugi dan neraca saja. BUMDes Meci Angi, BUMDes Melayu Mekar, BUMDes Mangge Baru dan BUMDes Hidi Rasa hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar saja. Sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis laporan keuangan yang harus dibuat yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci : SAK ETAP, Laporan Keuangan, BUMDes.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of SAK ETAP in the preparation of BUMDes financial statements in Lambu District, Bima Regency. The data analysis technique in this study is a qualitative descriptive method and only describes the results of interviews and documentation conducted in the field. There were 14 BUMDes analyzed. The results of this study indicate that there are only 13 BUMDes that have financial statements with the advantages and disadvantages of each New Usaha BUMDes, Rato New Business BUMDes, Sama Kai BUMDes, Soro Mandiri BUMDes and Harapan Bersama BUMDes only make a balance sheet. BUMDes Maja Labo Dahu and BUMDes Lu'u Lambu only make profit and loss statements. BUMDes Mantika Lanta only makes reports on changes in capital, BUMDes Damai only makes profit and loss reports and balance sheets. BUMDes Meci Angi. BUMDes Melayu Mekar, BUMDes Mangge Baru and BUMDes Hidi Rasa only make general cash books in the form of cash in and cash out. Meanwhile, according to SAK ETAP, there are five types of financial statements that must be made, namely balance sheets and income statements. Loss, statement of changes in equity, statement of cash flows and notes to financial statements.
Keywords: SAK ETAP, Financial Statement, BUMDes.

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Indonesia melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (Indonesia, 2004). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Saputra, 2020).

Salah satu bentuk terlaksananya BUMDes yang baik dapat dilihat dari penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan benar. BUMDes merupakan suatu lembaga yang didasari oleh landasan hukum. Oleh karena itu, penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan harus berlandaskan standar keuangan, sehingga menjadi acuan yang kuat dalam kepercayaan dan keterbukaan atas keuangan yang dikelola BUMDes dari semua pihak. Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu : 1) inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa; 2) potensi usaha ekonomi desa; 3) sumberdaya alam di Desa; 4) SDM yang mampu mengelola BUMDes; 5) penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Permendes Nomor 4 Tahun 2015)

BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Dan fungsi akuntansi itu sendiri untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal sebagai dasar dalam membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak (Kusrini, 2020).

Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*finansial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan dengan jujur dan transparan. Secara umum, prinsip pembukuan keuangan BUMDes tidak berbeda dengan pembukuan keuangan lembaga lain pada umumnya. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Dan fungsi akuntansi itu sendiri untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal sebagai dasar dalam membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah pengelola, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, perbankan dan masyarakat yang memberikan penyertaan modal, serta petugas pajak (Kusrini, 2020).

BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar akuntansi keuangan yang berlaku dan digunakan. Artinya dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau dikenal SAK ETAP. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

BUMDes harus secara eksplisit dan secara penuh mengungkapkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangannya. Penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku harus diungkapkan dalam kebijakan akuntansi dan catatan atas

laporan keuangan BUMDes. Standar akuntansi yang disarankan untuk penyajian laporan keuangan BUMDes sesuai dengan PERMENDES NOMOR 4 TAHUN 2015 adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2016)

SAK ETAP sangat cocok digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes karena standar ini sangat sederhana dibanding standar lainnya dan tidak menyulitkan saat penyusunan. Dalam SAK ETAP ada beberapa laporan keuangan yang harus disusun BUMDes yaitu Neraca, Laporan Perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan (Rani, 2020)

BUMDes harus secara eksplisit dan secara penuh mengungkapkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangannya. Penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku harus diungkapkan dalam kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan BUMDes. Standar akuntansi yang disarankan untuk penyajian laporan keuangan BUMDes sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Penggunaan SAK ETAP bertujuan agar laporan keuangan BUMDes dapat dipahami, relevan, materialitas, andal, dan tersaji lengkap (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Biaya historis dan nilai wajar merupakan dasar pengukuran yang digunakan oleh SAK ETAP. Perlakuan akuntansi juga lebih sederhana dan rata-rata tidak berubah selama beberapa tahun. Penggunaan SAK ETAP bertujuan agar laporan keuangan BUMDes dapat dipahami, relevan, materialitas, andal, dan tersaji lengkap (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Penelitian terdahulu yang mengangkat tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada laporan keuangan BUMDes telah dilakukan oleh Sianne (2014) ; Lutfiaazahra (2015) ; Rudini (2016); Oktavia (2021) ; Ayu (2020) ; Yuniarsari (2020) ; Kusrin (2020) ; Gunanda (2020) ; Hendrawan (2018) dan hasil penelitian dari riset-riset terdahulu lebih banyak menunjukkan bahwa pencatatan untuk laporan keuangan BUMDes tidak berdasarkan aturan SAK ETAP. Berdasarkan hasil-hasil riset terdahulu dan juga preliminary survey yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes salah satu Desa di Kec. Lambu pada saat peneliti akan melakukan audensi, yang bertujuan untuk merefleksikan kinerja kepengurusan BUMDes, Peneliti menilai dan menemukan laporan keuangan yang disajikan masih kurang dalam memberikan informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, dikarenakan sebagian besar pengurus BUMDes di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima masih sangat terbatas dari segi basis keilmuan akuntansinya, sehingga dilakukannya penelitian ulang tentang analisis implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes. (Rudini & Afriyanto, 2016)

TINJAUAN LITERATUR

Teori entitas menyatakan bahwa perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri terpisah dari identitas pemilik. Menurut Paton teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan dan tanggung jawab dimana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan bagi usaha pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dan diharapkan dapat memperoleh dana dimasa depan (Paton, 1962). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pemisah antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik. Dengan demikian, transaksi yang dicatat dan di pertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap berindak atas kepentingan sendiri terpisah dari pemilik (Ghozali & Chariri, 2007)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian deskriptif kualitatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Alasan peneliti memilih pendekatan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di BUMDes se Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang terdiri dari 14 BUMDes dan waktu penelitian adalah pada tahun 2022.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. wawancara yaitu tehnik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan Bendahara BUMDes se Kecamatan kabupaten Bima, guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Dokumentasi, peneliti menggunakan cara mengumpulkan laporan keuangan BUMDes kec. Lambu melalui dokumen yang berbentuk tulisan serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yang pertama reduksi data, kedua penyajian data dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada responden atau narasumber yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan BUMDes Kec. Lambu Kabupaten Bima, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan BUMDes berupa laporan keuangannya. Penyajian Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data (menyajikan data). pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDes di kecamatan Lambu, menganalisis penempatan pos-pos akun pada laporan keuangan yang dibuat, melihat kelengkapan laporan keuangan yang dibuat dan membandingkan dengan SAK ETAP yang menjadi alat analisa utama. Penarikan kesimpulan Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisis, maka proses selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melihat bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDes kecamatan lambu, kelengkapan laporan keuangannya, menganalisis penempatan pos-pos akun pada laporan keuangan yang dibuat dan dibandingkan dengan SAK ETAP, maka akan ditarik kesimpulan apakah laporan keuangan BUMDes di kecamatan Lambu sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan BUMDes di kecamatan Lambu Kab. Bima belum sesuai dengan SAK ETAP yang menjadi standar akuntansi yang disarankan dalam penyajian laporan keuangan BUMDes sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. BUMDes Usaha Baru hanya membuat laporan neraca dan buku kas umum saja. BUMDes Maja Labo Dahu hanya membuat laporan perubahan modal. BUMDes Damai membuat dua laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca. BUMDes Meci Angi tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas

umum. BUMDes Lanta Mantika hanya membuat buku kas umum berupa siklus pembayaran angsuran pinjaman saja. BUMDes Usaha Baru Rato tidak membuat laporan keuangan. BUMDes Melayu Mekar tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum. BUMDes Soro mandiri tidak membuat laporan keuangan. BUMDes Mangge Baru hanya membuat buku kas umum dan tidak membuat laporan keuangan. Sedangkan menurut SAK ETAP BAB 3 tentang penyajian laporan keuangan, entitas harus membuat laporan keuangan lengkap berupa ; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudini & Afriyanto (2016) bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang terjadi di BUMDes belum sesuai dengan SAK ETAP. Yuniarsari (2020) bahwa praktik akuntansi pada BUMDes mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana disebabkan keterbatasan pengetahuan akuntansi diantara pengelola BUMDes sehingga tidak mempraktekkan proses akuntansi yang memadai. Gunanda (2020) Laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Al-Kautsar tidak lengkap berdasarkan PSAK ETAP, kemudian adanya jumlah inventaris aset yang tidak sesuai dengan pencatatan, serta tidak mencantumkan pembayaran pajak mereka.

Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, diantara kendala yang banyak ditemukan dari hasil wawancara adalah keterbatasan Sumber daya manusia yang mampu membuat laporan keuangan dengan baik dan kurangnya keterlibatan pemerintah kabupaten dalam melakukan sosialisasi pembuatan laporan keuangan BUMDes, sehingga laporan keuangan yang dibuat masih sangat sederhana dan jauh dari standar akuntansi yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan pihak BUMDes Kecamatan Lambu terkait dengan kendala yang dihadapi oleh masing-masing BUMDes di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima : *“Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten terkait pencatatan laporan keuangan bumdes yang baik dan benar”* (Syahbulan, Ketua BUMDes Kaleo). *“Kurangnya SDM yang bisa menjadi bendahara bumdes dan mengerti pencatatan keuangan”* (Ipul, Ketua BUMDes Simpasai). *“Kurang keterlibatan pemerintah kabupaten dalam memberikan penyuluhan tentang pembuatan laporan keuangan yang baik mbak”* (Nurghaibi S. Pd, bendahara BUMDes Lanta). *“Sempat ada penyalahgunaan anggaran dua tahun lalu, sehingga sampai sekarang belum ada kejelasan laporan keuangan yang dibuat”* (Muhtar, Sekretaris Desa Rato). *“Kurangnya keterlibatan pemerintah dalam memberikan penyuluhan mbak”* (Rustam, bendahara BUMDes Sumi). *“Tidak dibuatnya laporan keuangan BUMDes dikarenakan kurangnya pemahaman SDM kita disini dek”* (Ismail, Sekretaris Desa Hidi Rasa). *“BUMDes kami belum punya komputer pribadi mbak, sehingga catatan keuangan kececer dan sering hilang”* (Bahnan, S. Sos, bendahara BUMDes Kaleo). *“Kita masih kekurangan SDM mbak”* (Misbah, Sekretaris Desa Mangge). *“Kurangnya kesadaran bendahara BUMDes untuk membuat laporan keuangan”* (Rizal, sekretaris Desa Monta Baru). *“Tidak adanya format baku dari pengurus BUMDes lama untuk laporan keuangan”* (Furkan, S.pd, bendahara BUMDes Monta Baru). *“Kurangnya sosialisasi atau pelatihan dari pusat untuk pengurus BUMDes mbak”* (Ilham, Kepala Desa Rato)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdita (2021) yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa BUMDes yang tidak Menerapkan SAK ETAP karena kekurangan SDM yang memahami akuntansi, dan penelitian yang dilakukan oleh Andreas & Sianne (2014) bahwa pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan SAK ETAP diakibatkan kurangnya sosialisasi SAK ETAP terhadap petugas yang membuat laporan keuangan dan dilandasi dengan pendidikan pengurus BUMDes yang bukan dari bidang akuntansi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Jayanti & Qomari (2018) yang menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi dibidang akuntansi oleh aparatur desa menjadi penghalang penerapan SAK ETAP di desa. Akibatnya informasi yang disampaikan pihak BUMDes terbatas.

Ada empat BUMDes di Kecamatan Lambu yang hanya membuat buku kas umum saja dan tidak membuat laporan keuangan, yaitu BUMDes Meci Angi, BUMDes Melayu Mekar, BUMDes Mangge Baru dan BUMDes Hidi Rasa. Hal ini bertentangan dengan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori entitas yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri terpisah dari identitas pemilik. Teori entitas menekan pada konsep kepengelolaan dan tanggung jawab dimana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan bagi usaha pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dan diharapkan dapat memperoleh dana dimasa depan (Paton, 1962).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan BUMDes di kecamatan Lambu sebagian sudah membuat laporan keuangan pada usahanya, tetapi belum menerapkan SAK ETAP. BUMDes Usaha Baru hanya membuat satu laporan keuangan, yaitu neraca. BUMDes Maja labo dahu hanya membuat laporan laba rugi. BUMDes Damai membuat dua laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca. BUMDes Meci Angi tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar. BUMDes Mantika Lanta hanya membuat laporan perubahan modal. BUMDes Usaha Baru Rato hanya membuat satu laporan keuangan, yaitu neraca. BUMDes Sama Kai Desa Sumi hanya membuat neraca. BUMDes Melayu Mekar tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar. BUMDes Soro Mandiri Desa Soro hanya membuat neraca. BUMDes Mangge Baru hanya membuat buku kas umum dan tidak membuat laporan keuangan. BUMDes Luu Lambu Desa Lambu hanya membuat laporan laba rugi saja. BUMDes Hidi Rasa tidak membuat laporan keuangan, hanya membuat buku kas umum berupa kas masuk dan kas keluar. BUMdes Harapan Bersama Desa Nggelu hanya membuat satu laporan keuangan, yaitu neraca.

Kendala yang dihadapi oleh BUMDes di Kecamatan Lambu yang ditemukan dalam proses penelitian ini adalah pertama praktik akuntansi pada BUMDes mengacu pada SAK ETAP (2016) belum terlaksana disebabkan keterbatasan pengetahuan akuntansi diantara pengelola BUMDes sehingga tidak mempraktekkan proses akuntansi yang memadai. Kedua, penerapan laporan keuangan BUMDes di kecamatan lambu Kabupaten Bima masih sangat sederhana, karena belum memperhitungkan aspek penting keuangan. Kesulitan yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan BUMDes di kecamatan Lambu disebabkan tidak lengkapnya laporan pembukuan yang mendukung data-data untuk pembuatan laporan keuangan. Ketiga, tidak optimalnya penyelenggaraan praktik akuntansi dan pemanfaatan informasi akuntansi pada BUMDes Kec. Lambu Kabupaten Bima selama ini bukanlah semata-mata merupakan kesalahan ataupun kekurangan para pengelola BUMDes saja, tetapi juga dikarenakan belum optimalnya peran serta Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam mendorong dan memfasilitasi praktik akuntansi di BUMDes yang ada di Kabupaten Bima.

REFERENSI

- Andreas, & Sianne, B. (2014). *Evaluasi Atas Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi Di Kota Bandar Lampung*.
- Ayu, I. G., Pramitari, A., Nurhayanti, K., & Putu, L. (2020). 2014, P. P. N. 3 T. (2016). *Permendes PDTT No. 3 Tahun 2014*.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*.
- Gunanda, R. (2020). *ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN*

- BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AL-KAUTSAR DESA KAMPUNG BARU SENTAJO PERIODE 2014-2018.*
- Hendrawan, S. (2018). *Analisis penerapan Akuntansi pada BUMDes Mawar Indah Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).*
- Indonesia, R. (2004). Presiden republik indonesia. In *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.*
- Jayanti, D. M., & Qomari, N. (2018). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Surya Sejahtera" Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.*
- Kusrini, H. (2020). *Pada laporan / keuangan.*
- Lutfiaazahra, A. (2015). *IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA UMKM PENGRAJIN BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA* Alifta Lutfiaazahra (Issue November).
- Nurdita, R. (2021). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Yang Ada di Kota Dumai.*
- Oktavia, T. D. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Bumdes Gunung Mulia Desa Greden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.*
- Paton, A. W. (1962). *Accounting Theory.*
- PERMENDES NOMOR 4 TAHUN 2015. (2015). *Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia.* 1–11.
- Rani, A. dan. (2020). *Gorontalo.* 3(2), 116–127.
- Rudini, N., & Afriyanto. (2016). *Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Langkitin Di Desa Langkitin.*
- Saputra, R. A. (2020). *ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CIBODAS DESA CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI BOGOR DESEMBER 2020 ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANG. 2019.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* ALFABETA.
- Yuniarsari, M. (2020). *Analisis penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Porwoasri Berseri (Studi kasus pada BUMDes di Desa Purwoasri).*
- 2014, P. P. N. 3 T. (2016). *Permendes PDPT No. 3 Tahun 2014.*
- Andreas, & Sianne, B. (2014). *Evaluasi Atas Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi Di Kota Bandar Lampung.*
- Ayu, I. G., Pramitari, A., Nurhayanti, K., & Putu, L. (2020). *PENERAPAN SAK ETAP PADA UNIT JASA PENGELOLAAN SAMPAH BUMDES DESA BUDUK*
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi.*
- Gunanda, R. (2020). *ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AL-KAUTSAR DESA KAMPUNG BARU SENTAJO PERIODE 2014-2018.*
- Hendrawan, S. (2018). *Analisis penerapan Akuntansi pada BUMDes Mawar Indah Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).*
- Indonesia, R. (2004). Presiden republik indonesia. In *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.*
- Jayanti, D. M., & Qomari, N. (2018). *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Surya Sejahtera" Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.*
- Kusrini, H. (2020). *Pada laporan / keuangan.*
- Lutfiaazahra, A. (2015). *IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA UMKM PENGRAJIN BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA* Alifta Lutfiaazahra (Issue November).
- Nurdita, R. (2021). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Yang Ada di Kota Dumai.*
- Oktavia, T. D. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Bumdes Gunung*

Mulia Desa Greden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Paton, A. W. (1962). *Accounting Theory*.

PERMENDES NOMOR 4 TAHUN 2015. (2015). *Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia*. 1–11.

Rani, A. dan. (2020). *Gorontalo*. 3(2), 116–127.

Rudini, N., & Afriyanto. (2016). *Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Langkitin Di Desa Langkitin*.

Saputra, R. A. (2020). *ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CIBODAS DESA CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI BOGOR DESEMBER 2020 ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANG. 2019*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.

Yuniarsari, M. (2020). *Analisis penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Porwoasri Berseri (Studi kasus pada BUMDes di Desa Purwoasri)*.